



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BALI
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GEDE PRAMANA
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 428837

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.344.138.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 109 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , WARISAN Rp. 238.418.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 860 m2/109 m2 di KAB / KOTA KOTA DENPASAR , WARISAN Rp. 1.105.720.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.016.800.000

1. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
3. MOBIL, HONDA HRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000
4. MOBIL, ISUZU TOURING Tahun 2004, WARISAN Rp. 115.000.000
5. MOBIL, TOYOTA INNOVA ZENIX Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 568.800.000
6. MOTOR, SMOOT ELEKTRIK ZUZU A/T Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 21.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 308.610.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 307.944.504

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.977.492.504

III. HUTANG Rp. 553.825.907



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

2.423.666.597

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.